

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN BELANJA PEGAWAI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2016)

Maharani Artga Khrisnadewi¹⁾, Praptiestrini²⁾

^{1,2)}Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

E-mail: prapti.unsa@gmail.com²⁾

Abstract

This study aims to find out whether Regional Original Income, Capital Expenditures and Employee Expenditures have an effect on Local Government Financial Performance with a Case Study in Regency / City Governments in Central Java Province in 2013 up to 2016. The population used in this study is the entire Realization Report Regency / City budgets in Central Java Province 2013 to 2016 which were published at www.djpk.depkeu.go.id used a sample of 25 districts / cities for 4 years. The research sample was determined by purposive sampling method. Hypothesis testing uses multiple linear regression analysis. The results of this research model indicate that (1) Regional Original Income has a significant effect on Local Government Financial Performance; (2) Capital Expenditure has a significant effect on Local Government Financial Performance; (3) Employee Expenditure does not have a significant effect on the Financial Performance of Regency / City Governments in Central Java Province in 2013 until 2016.

Keywords: *Regional Original Income, Capital Expenditures, Employee Expenditures, Local Government Financial Performance*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahan sentralistik selama pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan ekonomi serta kemiskinan yang besar. Dengan adanya otonomi daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota, maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada pada tangan daerah itu sendiri dan dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber untuk pembiayaan daerah. Kemampuan daerah dalam menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya tergantung dari segi pendanaan saja, namun juga pada bagaimana pengalokasian dana tersebut untuk pembiayaan daerah. Belanja modal merupakan salah satu jenis pembiayaan yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Belanja modal sangat erat keitannya dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Belanja modal yang besar merupakan cerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana yang dibangun. Selain belanja modal, belanja pegawai juga perlu diperhatikan dalam menganalisa kinerja keuangan daerah.

PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?
3. Apakah belanja pegawai berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah?

LANDASAN TEORI

1. Otonomi Daerah

Konsep otonomi daerah adalah bahwa kewenangan untuk menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja tetapi merupakan keputusan politik yang ditempuh guna meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya.

2. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik merupakan penerapan dan perlakuan akuntansi pada organisasi sektor publik atau pemerintahan. Sektor publik sendiri memiliki wilayah dan ruang lingkup yang lebih luas dan lebih kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.

3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara bersamaan untuk suatu periode tertentu (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 02).

4. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran dan tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu organisasi (Bastian, 2001:329).

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan sehingga teori belum ada kesepakatan mengenai nama dan kaidah pengukurannya (Halim, 2007:231). Berikut adalah rasio untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintahan:

a. Rasio Kemandirian Daerah

Halim (2007:232) menyatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjuk oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat} + \text{Pinjaman}}$$

b. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri oleh daerah terhadap total penerimaan daerah.

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara *output* dan *input* atau realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

d. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234).

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

e. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal.

$$\text{Rasio Keserasian} = \frac{\text{Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}}$$

f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah di capai selama beberapa periode (Halim, 2007:241).

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PADt1 - PADt0}{PADt0}$$

g. Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio ini mengukur seberapa besar pemerintah daerah mengalokasikan porsi dan total belanjanya untuk belanja modal.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$$

h. Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja

Rasio belanja pegawai mengukur seberapa besar pemerintah daerah menghabiskan dananya untuk keperluan pegawai.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}}$$

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar Pendapatan Asli Daerah. Sumber PAD terdiri dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

a. Pajak Daerah

- 1) Pajak Provinsi
- 2) Pajak kabupaten atau kota

b. Retribusi Daerah

- 1) Retribusi jasa umum
- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan usaha

c. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Pendapatan Asli Daerah Lain yang Sah

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan.
- 2) Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 3) Jasa giro
- 4) Bunga deposito
- 5) Penerimaan atau bantuan ganti rugi
- 6) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dll.

6. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

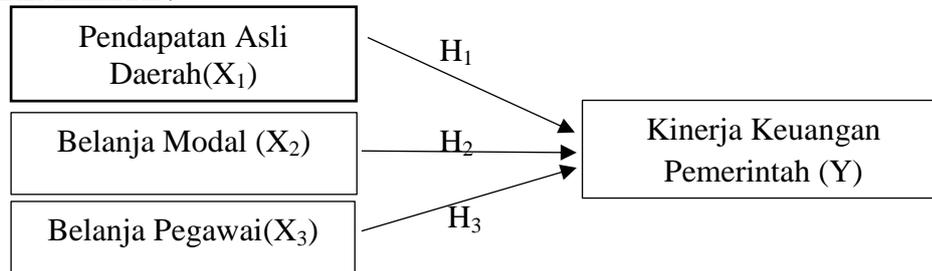
Belanja modal meliputi antara lain:

- a. Belanja Modal Tanah
- b. Belanja Modal Peralatan Mesin
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- e. Belanja Modal Fisik Lainnya

7. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HIPOTESIS

H₁: Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₂: Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

H₃: Belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Objek Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Objek penelitian dibatasi pada APBD dan LRA Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2016. Pemilihan data menggunakan data tahun 2013 s/d 2016 karena diambil data paling *update* yaitu dalam periode 5 tahun terakhir, namun karena data tahun 2017 belum dirilis, maka data yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah data Tahun Anggaran 2013 s/d 2016.

2. Jenis dan Sumber Data

Desain penelitian ini menganalisis suatu variabel yang mempengaruhi (*independen*) dan dipengaruhi (*dependen*) antara PAD, BPP, dan BM terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran yang dari APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 s/d 2016 yang bersumber dari *website* Kementerian Keuangan RI yaitu www.djpk.depkeu.go.id.

3. Populasi dan Sampel

Penulis menetapkan kriteria dalam mengambil sampel sebagai berikut:

- Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan telah di upload dalam *website* www.djpk.depkeu.go.id sampai dengan tahun 2017.
- Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan realisasi anggaran di sektor pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja pegawai yang digunakan dalam penelitian ini.
- Jumlah pendapatan asli daerah, belanja modal dan belanja pegawai tidak bernilai nol (0) atau minus (-).

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 29 Kabupaten dan 6 Kota. Sedangkan sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 25 Kabupaten/Kota yang melakukan memenuhi kriteria yang telah ditentukan tersebut. Penelitian ini memiliki periode waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2016, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 kabupaten/kota (25 kabupaten/kota x 4 tahun).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dokumentasi
Cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian (Nawawi, 1991:141).
- b. Studi Pustaka
Metode studi pustaka yaitu metode yang digunakan dengan memahami literatur-literatur yang memuat pembahasan yang berkaitan dengan penelitian dan juga pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan sumber bacaan yang relevan (Nawawi, 1991:141).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

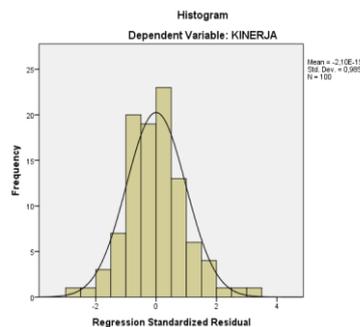
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Log_PAD	100	4,84	6,09	5,3388	,19997
Log_BP	100	5,51	6,23	5,9275	,16004
Log_BM	100	4,72	6,06	5,4004	,21940
KINERJA	100	,830	1,223	,98522	,069845
Valid (listwise)	N 100				

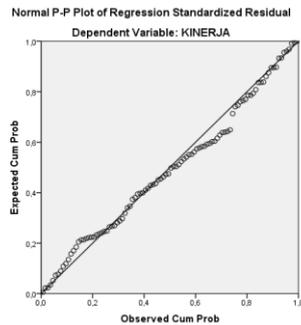
Sumber: Data yang diolah

Tabel tersebut menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 4,84, nilai maksimum sebesar 6,09 , rata-rata sebesar 5,33 dan standar deviasi sebesar 0,19. Hasil Pengujian variabel Belanja Pegawai (BP) memiliki nilai minimum 5,51 , nilai maksimum 6,23, rata-rata 5,92 dan standar deviasi sebesar 0,16. Hasil pengujian variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum 4,72, nilai maksimum sebesar 6,06, rata-rata sebesar 5,4 dan standar deviasi sebesar 0,21. Hasil pengujian variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum 0,83, nilai maksimum 1,22, rata-rata sebesar 0,98 dan standar deviasi sebesar 0,06.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data





Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat penyebaran residualnya. Dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang berpola normal dan grafik normal plot menggambarkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	,222	,229				
Log_PAD	-,037	,040	-,107	-,925	,357	,556	1,797
Log_BP	-,015	,047	-,034	-,311	,757	,633	1,581
Log_BM	,194	,038	,611	5,108	,000	,522	1,914

a. Dependent Variable: KINERJA

Berdasarkan uji multikolinearitas diatas diperoleh informasi bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel *independen* karena nilai *tolerance* dibawah 0,95 dan nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

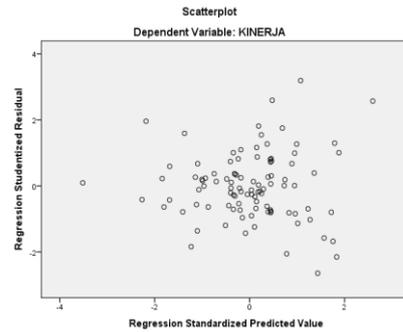
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,532 ^a	,283	,261	,060059	1,101

a. Predictors: (Constant), Log_BM, Log_BP, Log_PAD

b. Dependent Variable: KINERJA

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai Durbin-Watson (DW) dari hasil pengujian autokorelasi adalah 1,101. Berdasarkan hasil pengujian tersebut nilai D-W termasuk kedalam kriteria yang ditentukan yaitu berada diantara -2 dan 2, yakni $-2 \leq 1,101 \leq 2$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas



Dari grafik scatterplots di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan masukan variabel independen: pendapatan asli daerah, belanja pegawai dan belanja modal.

e. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	,532 ^a	,283	,261	,060059

a. Predictors: (Constant), Log_BM, Log_BP, Log_PAD

b. Dependent Variable: KINERJA

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Adj. R^2 koefisien determinasi model persamaan regresi memiliki nilai sebesar 0,261 atau 26,1%. Hal ini menunjukkan bahwa 26,1% dari nilai variabel *dependen* (Kinerja) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel *independen* (Pendapatan asli daerah, Belanja pegawai dan Belanja modal). Sisanya sebesar 73,9% tidak dapat dijelaskan oleh persamaan regresi atau dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model analisis.

3. Pengujian Hipotesis

a. Analisis Linear Berganda

Hasil pengolahan data dengan analisis regresi linier berganda dari SPSS versi 21 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5. Analisis Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,222	,229		,969	,335
1 Log_PAD	-,037	,040	-,107	-,925	,357
Log_BP	-,015	,047	-,034	-,311	,757
Log_BM	,194	,038	,611	5,108	,000

a. Dependent Variable: KINERJA

b. Uji t

Hasil pengujian terhadap ketiga variabel independen (PAD, BP, dan BM) dapat diketahui variabel *p-value* masing-masing variabel *independen* untuk PAD sebesar 0,357 dan BM sebesar 0,000 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena nilainya kurang dari 0,05. Sedangkan variabel BP nilai signifikannya sebesar 0,757 berarti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

c. Uji f

Uji signifikansi penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria pengambilan kesimpulan adalah hipotesis penelitian diterima jika *probability value* (*p-value*) < 0,05.

Tabel 6. Uji f
ANOVA^a

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	,137	3	,046	12,631	,000 ^b
Residual	,346	96	,004		
Total	,483	99			

a. *Dependent Variable*: KINERJA

b. *Predictors*: (*Constant*), Log_BM, Log_BP, Log_PAD

Tabel diatas menunjukkan bahwa model persamaan regresi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dibanding taraf signifikansi $\alpha < 5\%$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen (PAD, BM dan BP) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (kinerja).

4. Hasil Uji Hipotesis

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi diperoleh nilai t-hitung sebesar -0,925 dan nilai signifikansi $0,357 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada taraf 5%, sehingga hipotesis pertama diterima.

H₂: Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi diperoleh t-hitung sebesar 5,108 dengan signifikansi 0,000. Nilai signifikansi dibawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada taraf 5% sehingga hipotesis kedua diterima.

H₃: Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian regresi diperoleh t-hitung sebesar -0,311 dengan signifikansi sebesar 0,757. Nilai signifikansi diatas 0,05 menunjukkan bahwa variabel Belanja Pegawai tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada taraf 5% sehingga hipotesis ketiga ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah, sehingga dengan peningkatan atau penurunan pendapatan asli daerah akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan peningkatan atau penurunan belanja modal akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dengan peningkatan atau penurunan belanja pegawai tidak mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis mengemukakan beberapa saran yang ditujukan khususnya untuk pemerintah daerah, dana peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah di setiap daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah hendaknya lebih mengetahui potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga dapat mengetahui komponen pendapatan asli daerah yang mana yang harus ditingkatkan.
2. Disamping peningkatan pendapatan, pemerintah daerah juga perlu untuk meningkatkan belanja modal guna pembangunan sarana dan prasarana daerah sebagai layanan publik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

REFERENSI

- Andirfa, Mulia, dkk. 2016. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Erlangga.
- Budianto, dkk. 2016. *Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdullah. 2007. *Akuntansi Sektor Publik – Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga, Jakarta: Salemba Empat.
- Kusrina, Bertilia Lina. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) Terhadap Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Daerah Otonomi Baru di Indonesia*. Jurnal Akuntansi. Universitas Gunadarma
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: ANDI.
- Muhayanah, Fisa Aprilia. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013*. Jurnal Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nugroho, Fajar, dkk. 2012. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep Dasar Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan di Era Otonomi*, Jakarta: Taushia.
- Prasasti, Swastika Enjang. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY Tahun 2007 – 2013)*. Jurnal Akuntansi. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Rachmawati, Ria. 2017. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Belanja Pegawai Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2012 s/d 2015)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- www.djpk.depkeu.go.id